



Kabupaten Kutai Timur
Kecamatan Karang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKjIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN KARANG



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Karanganyar. Kinerja Kecamatan Karanganyar diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja



seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Karangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Karangan, 15 Januari 2026

Camat,



MADNUH, SP.,M.A.P

Pembina/IVa

NIP. 19681023 200604 1 010



DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR BAGAN.....	7
BAB I	9
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang	9
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	10
C. Aspek Strategis Organisasi.....	22
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	24
E. Landasan Hukum	35
F. Sistematika.....	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA	41
A. Rencana Strategis	41
1. Visi.....	42
2. Misi.....	42
B. Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	46
1. Tujuan	46
2. Sasaran Organisasi.....	49
C. Indikator Kinerja Utama.....	55
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	81
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	83



B.	Realisasi Anggaran.....	80
C.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
BAB IV PENUTUP		93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Tahun 2024-2026.....	23
Tabel 1. 2 Data Indeks Pembangunan Desa Kecamatan Karangan	29
Tabel 1. 3 Permasalahan Kecamatan Karangan.....	29
Tabel 1. 4 Isu Sentral yang akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur.....	34
Tabel 1. 5 Sistematika Penyusunan LKjIP Kecamatan Karangan	39
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur.....	52
Tabel 2. 2 Perubahan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur	54
Tabel 2. 3 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur	56
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Karangan	59
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangan Tahun 2025.....	60
Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Kecamatan Karangan Tahun 2025	62
Tabel 2. 7 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangan Tahun 2025.....	71
Tabel 2. 8 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangan Tahun 2025.....	72
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	82
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Tahun 2025.....	84
Tabel 3. 3 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Karangan Tahun 2025	86
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kecamatan Karangan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	88
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	90
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	72
Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	80
Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Peta Jabatan Tahun 2025 Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur ...	21
---	----

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karanganyar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi



daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai



pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri mekanisme pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat telah diatur didalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor



21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemkab Kutai Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai contoh Wewenang yang diberikan kepada Camat meliputi Bidang Sosial Kemasyarakatan memberikan rekomendasi pengumpulan uang untuk kegiatan sosial, memberikan rekomendasi kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan diluar daerah, pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah, pemberian rekomendasi Bantuan Sosial.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Kecamatan Karangan terdiri dari 4 (Empat) Seksi dan 2 (dua) sub Bagian di bawah sekretariat kecamatan yaitu :

1. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Program, Evaluasi, Keuangan dan Pelaporan
2. Seksi Pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka telah ditetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kecamatan Karangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Karangan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Yang tidak dilaksanakan oleh unut kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, maka camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dengan tugas pokok dan fungsi ;

1. Tugas Pokok

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.



Sekretaris Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kecamatan , maka sekretaris Kecamatan membawahi 2(dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta asset,



penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur, maka camat membawahi 4 (Empat) seksi dengan uraian tugas masing masing :

1. Seksi Pemerintahan Umum Pemerintahan dan Pelayanan Publik

dengan uraian tugas;

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;



- h. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- i. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. Melaksanakan urusan pemerintah yang terkait dengan nonperizinan; dan
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan yang dilimpahkan.
- o. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- p. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan dengan uraian

tugas :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- c. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- d. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- g. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- h. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i. Evaluasi Kelurahan;
- j. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- k. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l. Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- m. Penyedia Sarana dan Prasarana lembaga kemasyarakatan;
- n. Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat;



- o. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM; dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Senergitaas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical Kecamatan;
- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati; dan
- e. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tugas sebagai berikut :

- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa;
- b. Fasilitasi penyusunan paraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;



- d. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- e. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kepala desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- j. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- k. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah peta jabatan Kecamatan Karangan dengan Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh beberapa jabatan struktural dan staf . Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur :



Bagan 1. 1 Peta Jabatan Tahun 2025 Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KEKUATAN PEGAWAI							
IV/e	: 0	III/d	: 3	II/d	: 2	I/d	: 0
IV/d	: 0	III/c	: 2	II/c	: 0	I/c	: 0
IV/c	: 0	III/b	: 3	II/b	: 1	I/b	: 0
IV/b	: 0	III/a	: 0	II/a	: 1	I/a	: 0
IV/a	: 1	IX	: 2	V	: 7		

PEGAWAI TERDIRI DARI			
Es.I	: 0	Es.III	: 1
Es.II	: 0	Es.IV	: 3
FUNGSIONAL TERTENTU			: 0
PELAKSANA			: 18

KETERANGAN	
	ESELON III
	ESELON IV
	Jabatan Fungsional

CAMAT
Madnuh, SP, M.A.P
NIP. 19681023 200604 1 010

SEKRETARIS
-

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Fajrin, S. Pd
NIP. 19830729 200903 1 010

PLT. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Muhamad Yamani, S.Sos
NIP. 19810322 201406 1 003

PLT. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
H. Didi, S.IP
NIP. 19680524 200906 1 003

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Karsino, SP. MP
NIP. 19730507 200212 1 001

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Hubertus Umar, SH
NIP. 19791027 200502 1 001

PLT. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Dominggus Pakabu, SH
NIP. 19820414 201503 1 002

DESA



C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan keberadaan Kantor Camat Karang Kabupaten Kutai Timur dengan indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kantor Camat Karang Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat dengan Indikator Sasaran Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target diakhir masa periode renstra 100%.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Sasaran Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan diakhir masa periode Renstra 100%;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa diakhir masa periode Renstra 100 Persen;
4. Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa dengan Indikator Persentase desa/kelurahan dengan pelaporan keuangan tertib dan baik dengan target diakhir masa periode Renstra 100%;
5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dengan skor 75 diakhir masa periode Renstra;
6. Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Predikat AKIP



(Nilai Predikat AKIP merupakan hasil pengukuran Kinerja OPD) dengan nilai BB di akhir masa periode Renstra sebesar 75

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Tahun 2021-2026 mengacu RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2024)	Target Tahun (2025)	Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kegiatan	6	6	6
2	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Pelanggaran	0	0	0
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Persentase	100%	100%	100%



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2024)	Target Tahun (2025)	Kondisi Akhir Periode Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik di kecamatan	Kegiatan	23	24	24
6	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat IKM (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	75,00	81,18	85,18
		Predikat AKIP merupakan hasil pengukuran Kinerja OPD)	Angka	54,50	56,35	75,00

D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:



1. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Posisi Kecamatan Karangan yang berada paling utara dari wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau membuat wilayah Kecamatan Karangan kerap luput dari perhatian pemerintah Daerah. Dalam teori pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Yang terjadi pada saat ini Kecamatan Karangan sejak dimekarkan pada tahun 2005 tidak menunjukkan perkembangan maupun kemajuan yang signifikan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan wilayah maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a) Jarak Kecamatan Karangan yang sangat jauh dari ibukota Kabupaten Kutai Timur yaitu sejauh 157 Km membuatnya jarang tersentuh kegiatan pembangunan
- b) Akses jalan poros masih merupakan kawasan areal perkebunan kelapa sawit membuatnya tidak dapat dilakukan perencanaan dan pembangunan badan jalan yang baik sesuai dengan standar teknis.
- c) Biaya material di Kecamatan Karangan masih relatif mahal karena pengaruh mahal nya ongkos logistik ke Kecamatan Karangan dikarenakan akses jalan yang masih belum baik.



1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih tingginya Pelanggaran Perda Perkada di wilayah kecamatan;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat baik itu PKH, Bansos Sembako, Bansos El Nino, Bansos Inflasi, Bansos Non Tunai dan bantuan keagamaan lainnya) dalam upaya mendukung daya beli masyarakat;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.



3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN

diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum dapat dilaksanakan nya pelayanan perijinan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat yang telah dilimpahkan;
- d) Belum maksimalnya tingkatcapaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian Rencana Kinerja OPD Kecamatan;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

4. Tingkat Indeks Pembangunan Desa masih belum memadai,

Untuk mengukur Tingkat Kemajuan Desa, maka Pemerintah dapat mengukur Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh BAPPENAS RI. Hasil dari perbaikan IPD adalah meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri. IPD mengkategorikan desa ke dalam tiga kelompok, yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal.



Terdapat lima dimensi yang diukur yaitu :

1. Pelayanan Dasar
2. Kondisi Infrastruktur
3. Aksesibilitas/Transportasi
4. Pelayanan Umum
5. Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur tergolong dalam kategori desa berkembang mulai dari tahun 2016 hingga 2025. IPD Kabupaten Kutai Timur pada tahap awal perhitungan yang dilakukan oleh BAPPENAS Tahun 2014 sebesar 56,37. Tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penilaian IPD di 139 desa. Hasil penilaian menunjukkan nilai IPD Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan menjadi 61,93 pada Tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 63,97 pada Tahun 2019. Khusus di Kecamatan Karangan sejak Tahun 2017, ada salah satu Desa yang berdasarkan status IPD nya masih tertinggal yakni Desa Baay dengan skor 47,64. Namun berdasarkan hasil monitoring IPD yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021, status Desa Baay saat ini sudah menjadi Desa Berkembang dengan skor nilai 56,02.



Tabel 1. 2 Data Indeks Pembangunan Desa Kecamatan Karang

NO	Nama Desa	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
1	Ba'ay	47,64	Tertinggal	47,64	Tertinggal	47,64	Tertinggal	56,02	Berkembang
2	Karangan Dalam	63,76	Berkembang	63,76	Berkembang	63,76	Berkembang	75,14	Maju
3	Batu Lepoq	57,40	Berkembang	57,40	Berkembang	57,40	Berkembang	52,61	Berkembang
4	Mukti Lestari	55,67	Berkembang	55,67	Berkembang	55,67	Berkembang	65,96	Berkembang
5	Karangan Hilir	67,74	Berkembang	67,74	Berkembang	67,74	Berkembang	69,14	Berkembang
6	Karangan Seberang	63,21	Berkembang	63,21	Berkembang	63,21	Berkembang	75,99	Maju
7	Pengadan	55,91	Berkembang	55,91	Berkembang	55,91	Berkembang	60,56	Maju
Rata Rata IPD Kecamatan		58,76	Berkembang	58,76	Berkembang	58,76	Berkembang	65,06	Berkembang

Berdasarkan penjelasan tersebut maka permasalahan yang di hadapi Kecamatan Karang adalah sebagai

Tabel 1. 3 Permasalahan Kecamatan Karang

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai	Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif
		Masih banyak nya pelanggaran terhadap	Minimnya Sosialisasi dan penindakan dari
		Perda dan Perkada Kabupaten Kutai Timur	aparatus berwenang seperti Satpol PP Kabupaten Kutai Timur
2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT, Karang Taruna, Posyandu) di desa	Minimnya Pengetahuan dan Anggaran Operasional LKD



No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Tidak dilibatkannya Pemdes dan Kecamatan dalam Pendataan DTKS
		Belum optimalnya penyaluran BPNT, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait yakni Dinas Sosial dan perbankan dan Kantor Pos.
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		ASN Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	Terbatasnya jumlah ASN yang tersedia serta pengetahuan ASN
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
4.	Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa	Belum semua desa yang administrasi
		yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	pengelolaan keuangannya baik



No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
5.	Administrasi Desa dan Kantor Camat Karanganyar masih belum tertib	Belum diselenggarakannya tata naskah dinas dan tata kearsipan yang baik	Kurangnya pengetahuan aparatur desa dan aparatur Kecamatan mengenai tata naskah dinas dan pengelolaan arsipnya
6	Status IPD belum optimal	Kinerja Pembangunan Desa masih belum dapat meningkatkan IPD	Perlu penyusunan strategi arah pembangunan desa menuju peningkatan IPD

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Kurangnya administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kantor Camat Karanganyar.
2. Kurangnya pengetahuan staf Kantor Camat Karanganyar mengenai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Penataan Administrasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
5. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;



6. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Didalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021- 2026 setidaknya ada 7 (tujuh) rumusan Isu Strategis yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yaitu :

1. Penyediaan layanan dasar dan fasilitas dasar untuk mendukung daya saing ekonomi
2. Peningkatan jaminan sosial
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak
7. Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota. Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator pelayanan administrasi umum Pemerintahan dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut :



1. Mendukung koordinasi antar OPD
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar masyarakat dan OPD.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi implementasi kebijakan kepala daerah:
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya 3 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Karangas periode 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 1. 4 Isu Sentral yang akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	Cukup Intensif seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Semakin sangat Intensif	Adapun poin-poin SDGs yang perlu mendapat perhatian dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah: a. Masalah Kemiskinan; b. Masalah Kelaparan dan Ketahanan Pangan; c. Masalah indikator kesehatan; d. Masalah pendidikan inklusif; sanitasi; f. Masalah ketenagakerjaan dan pertumbuhan inklusif
2	Good Governance (Transparansi, partisipasi, akuntabilitas)	Menjadi tuntutan yang cukup mendesak	Menjadi tuntutan yang sangat mendesak	- Aksesibilitas informasi akan semakin mudah diperoleh - Tingkat kepedulian warga Desa terhadap proses Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin tinggi.



No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1	2	3	4	5
3	Digitalisasi layanan pemerintahan dan pelayanan public	Sarana dan Prasarana belum tersedia sepenuhnya	Pemerintahan digital merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Tujuannya tidak lain ialah mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat.	Perlunya peningkatan kapasitas SDM baik aparatur Kecamatan dan aparatur desa dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Perlu nya pengadaan sarana dan prasarana teknologi guna mendukung pelayanan public

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Karangasem ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah,

- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- h) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Karangan , Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur



- j) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026;
- m) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- n) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemkab Kutai Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 tahun 2013;
- o) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
- p) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- r) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025;
- s) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- t) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- u) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang penjabarab APBD 2025.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Karangas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

Tabel 1. 5 Sistematika Penyusunan LKjIP Kecamatan Karangas

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur telah



melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan



bersatu

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor

Pertanian

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara

Proporsional dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis

Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah di

Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk.

1. Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Kutai Timur.
2. Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk



memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru , baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum – yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk Masyarakat dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

b. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai eksese negative sebagai bentuk konsukwensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Karangan adalah :



1. Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan dimasyarakat (M1, T1, S4, ST 4).

Nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam membangun karakter privat dan publik warga Negara. Namun keberadaan dan keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam menghidupkan/menggiatkan kembali kesenian tradisional sebagai usaha membangun karakter warga Negara. Sebagai salah satu sarana untuk melakukan revitalisasi karakter bangsa dengan mengembangkan dan menggali nilai nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat.

Begitu juga nilai nilai keagamaan dapat membentuk karakter suatu bangsa yang beradab dan berperilaku baik. Keberagaman agama yang ada di Kecamatan Karanganyar dapat menjadi modal utama dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi (M4.T1.S1.ST1)

Perkembangan paradigma administrasi publik mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi Komputer . contoh dari kemajuan teknologi tersebut misalnya kemajuan elektronik berbasis internet. Model ini, diharapkan dapat membantu organisasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik berupa produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah, meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya produksi serta dapat



meningkatkan kerja sama/koordinasi baik antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pihak swasta maupun antar pusat dan daerah.

d. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk.

Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi.

B. Tujuan dan Sasaran Organisasi

1. Tujuan

Kecamatan Karangan merupakan bagian integral dari Kabupaten Kutai Timur dimana segala aspek pembangunan harus terpadu agar terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, sinergi dan optimal. Penjabaran dari tujuan Kecamatan Karangan adalah dengan melakukan fungsi pelayanan yaitu menjadi organisasi yang proaktif didalam menjalankan pelayanan dan pembinaan masyarakat dan desa yang ada di wilayah Kecamatan Karangan .

Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dilaksanakan dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan ditingkat masyarakat dan disalurkan melalui perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta mengawal dan memelihara hasil pembangunan yang ada sehingga bermanfaat dan dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Karangan yang BERTAMBAH (BERSIH, TAMBAH, MAJU)



Rapih, Indah, Unik dan Nyaman). Di samping itu Aparatur di Kecamatan Karanganyar harus dapat menerapkan nilai-nilai profesional yaitu :

a) Disiplin Dan Bermoral Tinggi

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dll)

Moral secara umum diartikan sifat ataupun akhlak (ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya, memtingkan diri sendiri)

b) Proaktif, Kreatif Dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan Kreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan

c) Berjiwa Wirausaha (Entrepreneurship)

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsip termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

d) Berorientasi Pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya



dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

e) Haus Akan Ilmu Pengetahuan

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang.

f) Berorientasi Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

g) Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya.

Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama



daripada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekuen dalam mempertanggungjawabkannya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-misi Kabupaten Kutai Timur.

2. Sasaran Organisasi

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut : Keberadaan Kecamatan Karangan diantaranya untuk mewujudkan Misi yang Pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu

1. Tujuan dan sasaran Misi 1 :

a. Tujuan

Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

b. Sasaran

Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1,T1 S4) dengan Indikator Sasaran Pembinaan Wawasan Kebangsaan serta Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya. Adapun Sasaran OPD adalah Meningkatkan wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan



masyarakat dengan Indikator Sasaran yang ini dicapai Kecamatan Karangan adalah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Sedangkan Misi Kabupaten Kutai Timur yang ingin dicapai Kecamatan Karangan adalah untuk mewujudkan Misi yang ke empat yaitu : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

2. Tujuan dan Sasaran Misi ke Empat

Tujuan dari Misi ke empat ini adalah Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1) serta Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas (M4.T2). Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan (M4,T1,S1)
- b. Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)

Dalam Renstra awal Kecamatan Karangan , Sasaran organisasi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat dengan indikator Sasaran Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 100%;
- b. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



publik di kecamatan dengan skor 76;

- c. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Sasaran Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan target 100%;
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100%;
- e. Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa dengan Indikator Sasaran Persentase desa/kelurahan dengan pelaporan keuangan tertib dan baik dengan target 100%;
- f. Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Predikat AKIP (Nilai Predikat AKIP merupakan hasil pengukuran Kinerja OPD) dengan target skor BB;

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Karangasem Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target Awal (2021)	Target						KET
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir	
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	17 %	33 %	50 %	67 %	83 %	100 %	100 %	
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	20 %	40 %	71 %	80 %	86%	100 %	100 %	
3		Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	0 %	17 %	33 %	58 %	83 %	100 %	100 %	
4		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil Penilaian	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	C Skor Nilai	C Skor Nilai	B Skor Nilai	B Skor Nilai	BB Skor Nilai	BB Skor Nilai	BB Skor Nilai	



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target Awal (2021)	Target						KET
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir	
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	72,92	73	74	75	76	76	
6		Persentase desa/kelurahan dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	0 %	43 %	57 %	86 %	100 %	100 %	100 %	



Tabel 2. 2 Perubahan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target Awal(Thn 2021)	Target						Ket
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	4	4	4	5	5	5	5	
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	66,5	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53	74,53	
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	0	0	54,50	56,35	60,00	65,00	65,00	



C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 3 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
01.00	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	01.01	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan serta pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	Jumlah	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah jenis kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat Kebangsaan bagi warga negara	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun	Renstra
02.00	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	02.01	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan serta pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	Jumlah	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan adalah jenis kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat Kebangsaan bagi warga negara	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun $IPD = (\sum_{i=1}^n W_i \cdot I_i)$ Di mana: * IPD adalah Indeks Pembangunan Desa. * n adalah jumlah dimensi yang diukur. * W_i adalah bobot relatif untuk dimensi ke-i. * I_i adalah indeks untuk dimensi ke-i.	Renstra



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
03.00	Meningkatkan layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata	03.01	Indeks Pembangunan Desa	Indeks	Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu desa. IPD mencakup berbagai dimensi pembangunan,		Bappeda
					Termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.		
04.00	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	04.01	Indeks Pembangunan Desa	Indeks			
05.00	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan dan akuntabel berbasis elektronik	05.01	Nilai SAKIP	Nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.		Inspektorat Daerah



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
06.00	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	06.01	Nilai SAKIP	Nilai			



D. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Karang Tahun 2024 :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Karang

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	6
	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Skor	69,72
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa	Skor	
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	Skor	60.00
	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	Skor	



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024- 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal Maret bulan Juni tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100%



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persen	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	100%
4	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	Persen	100%
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	IKM	81,18
6	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat AKIP (Nilai Predikat AKIP merupakan hasil pengukuran Kinerja OPD)	Nilai	BAIK



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Karang :

Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Kecamatan Karang Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	Rp 5.214.401.775,00
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 52.427.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 52.427.000,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	RP.0,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Rp 4.047.406.007,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Rp 3.975.451.007,00
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Logistik Kantor yang Disediakan Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 354.406.323
	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	4 Laporan	



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.2.7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp 15.075.000,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah-	1	Rp 117.878.500
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Paket	Rp 33.781.000,00
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	Rp 15.075.000,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	159	Rp 117.878.500,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	Rp 63.362.500,00
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 paket	Rp 54.516.000,00
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	Rp 0,00
1.4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	Rp 506.992.271,00
1.4.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 80.119.000,00
1.4.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 39.987.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.4.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 36.292.600,00
1.4.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 32.210.671,00
1.4.9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Rp. 62.100.000,00
1.4.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Rp. 256.283.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Rp 98.604.229,00
1.5.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp 13.927.000,00
1.5.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 84.677.229,00
1.5.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Rp 248.187.768,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 66.000.000,00
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 182.187.768,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Rp 94.050.000,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 79.450.000,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp 14.600.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 Layanan	Rp 54.030.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	Rp 24.366.000,00
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	Rp 24.366.000,00
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	6 Kegiatan	Rp 15.255.000,00
2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Rp 15.255.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Kegiatan	Rp 0,00
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	Rp 0,00
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5 Kegiatan	Rp 14.409.000,00
2.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	4 Laporan	Rp 14.409.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan	100%	Rp 296.871.000,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	Rp 269.871.000,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 32.320.000,00
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	6 Dokumen	Rp 38.181.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	di Wilayah Kerja Kecamatan	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp 199.370.000,00
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1	0
3.2.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	1 Keluarga	0
3.2.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0	Rp71.051.000,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	46.181.000,00
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	8 Laporan	Rp 46.181.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Rp 0,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Kali	Rp 24.870.000,00
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Rp 24.870.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7 Pembinaan	Rp 125.277.000,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	3 Kegiatan	Rp 125.277.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Indonesia		
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	Rp 85.170.000,00
5.1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Orang	Rp 0,00
5.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	Rp 40.107.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	Rp 50.528.000,00
6.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	Rp 50.528.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa		
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	Rp 18170.000,00
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp 23.067.000,00
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	Rp 9.291.000,00
6.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Rp 0,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- o Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- o Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- o Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan



dan alokasi anggaran) serta arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka dilakukan lah perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi Kecamatan Karang dengan uraian target kinerja.

Untuk itu perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang Tahun 2025 dengan tabel berikut:

Tabel 2. 7 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang Tahun 2025

O	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	4
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	
3	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Skor	69,72
4	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa	Skor	3,40
5	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	Skor	70.00
6	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	Skor	75.00



Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Persen	100%	5.214.401.775
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	52.427.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	52.427.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	90%	4.047.406.007
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23	3.975.451.007
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	56.880.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.075.000



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	48.856.000,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan\Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	33.781.000,00
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan\Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	15.075.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	117.878.500,00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	69	63.362.500,00
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	54.516.000,00
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0,00
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	59	506.992.271,00
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan\Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	80.119.000,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.987.000,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.292.600,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	32.210.671,00
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	62.100.000,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	256.283.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	98.604.229,00
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	84.677.229,00
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	13.927.000,00
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teredianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	15	248.187.768,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	66.000.000,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	182.187.768,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	94.050.000,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	79.450.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	14.600.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan	20	54.030.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	6	24.366.000,00
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	24.366.000,00
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan	6	15.255.000,00
2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	15.255.000,00
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kegiatan	4	0,00
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kegiatan	5	14.409.000,00
2.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kegiatan	5	14.409.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Persen	90%	269.871.000,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Lembaga	3	269.871.000,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7	32.320.000,00
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6	38.181.000,00
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	199.370.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	Kasus	0	71.051.000,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	46.181.000,00
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	46.181.000,00
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	0,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	10	24.870.000,00
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	24.870.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	5	125.277.000,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kegiatan	3	125.277.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
		Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	85.170.000,00
5.1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	12	0,00
5.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokum en	3	40.107.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase CakupanFasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	90	50.528.000,00
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokum en	120	50.528.000,00



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	18.170.000,00
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	23.067.000,00
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	9.291.000,00
6.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	1	20%	Sangat Rendah	Evaluasi Renja
	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat						
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	60	0	0%	Sangat Rendah	Bappeda Kutai Timur
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa						
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	0	0	0%	Sangat Rendah	Inspektora t Daerah
	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik						

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Kecamatan Karangan yang pertama yakni Meningkatnya



Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat, selama tahun 2023, kegiatan yang mendukung pelaksanaan tujuan dan Sasaran ini hanya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Camat Karang yakni memperingati HUT RI 17 Agustus 2023. Namun karena minimnya koordinasi dan konsolidasi internal menyebabkan beberapa kegiatan seperti Upacara Hari Besar Nasional tahun 2023 urung dilakukan.

2. Untuk tujuan yang kedua yakni Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata dengan sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, selama tahun 2021 dan tahun 2022 belum pernah dilakukan kembali survei dan evaluasi Indek Pembangunan Desa oleh instansi terkait yakni Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Semoga ditahun 2024 mendatang dapat dilakukan evaluasi terhadap kondisi desa desa yang ada di Kecamatan Karang;
3. Untuk tujuan yang ketiga Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik dengan sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik.

evaluasi SAKIP oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yakni inspektorat Daerah. Sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui skor indeks SAKIP yang dimiliki oleh Kantor Camat Karang. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Karang Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	5	50
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat				
3	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0	74,53	25
4	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa				
5	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	0	75	25
6	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik				



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Kecamatan Karangasem yang pertama yakni Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat, sejak awal tahun pelaksanaan Renstra yakni pada tahun 2021 terjadi pandemic Covid 19 dan terjadi pembatasan kegiatan yang mengundang kerumunan, sehingga kegiatan yang mendukung pelaksanaan tujuan dan Sasaran ini hanya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Camat Karangasem baru bisa dilakukan pada saat memperingati HUT RI 17 Agustus 2022. Namun karena minimnya koordinasi dan konsolidasi internal menyebabkan beberapa kegiatan seperti Upacara Hari Besar Nasional serta pembinaan wawasan kebangsaan lainnya urung dilakukan.
2. Untuk tujuan yang kedua yakni Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata dengan sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, sejak dimulainya periode Renstra tahun 2021 dan tahun 2024 belum pernah dilakukan kembali survei Kutai Timur. Semoga ditahun 2025 mendatang dapat dilakukan evaluasi terhadap kondisi desa desa yang ada di Kecamatan Karangasem.
3. Untuk tujuan yang ketiga Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik dengan sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik Sejak tahun 2023 yaitu sejak

Kecamatan Karangun terbentuk sudah pernah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui inspektorat Daerah. Sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui skor indeks SAKIP yang dimiliki oleh Kecamatan Karangun.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kecamatan Karangun Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional 2022	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	Nihil	-
	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat				
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0	60,05	0
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa				



3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	0	61,6	0
	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik				

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	1	20%	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan masih belum dikoordinasikan dengan pihak dan instansi terkait, diperlukan dukungan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan	Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi persiapan kegiatan dengan instansi terkait serta menjadwalkan kegiatannya secara rutin
	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat						
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	60	0	0%	Belum pernah dilakukan penilaian IPD oleh instansi terkait	Perlu dilakukan penilaian IPD secara mandiri atau mengajukan permohonan penilaian kepada instansi terkait seperti Bappeda dan BPS
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa						
	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik					Belum pernah dilakukan	Perlu dilakukan penyusunan dokumen pendukung secara



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	0	0	0%	penilaian SAKIP oleh instansi terkait, perlu dilakukan penyusunan dokumen pendukung yang terkait dengan penilaian SAKIP	berkala seperti PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, dan dokumen pendukung lainnya, serta mengajukan permohonan penilaian kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat dilakukan evaluasi SAKIP Kecamatan Karangasem



Analisis Keberhasilan/Kegagalan untuk Tujuan Kecamatan Karangan yang pertama yakni Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat adalah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan masih belum dikoordinasikan dengan pihak dan instansi terkait, diperlukan dukungan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan. Untuk itu sebagai solusinya perlu diadakan rapat evaluasi dan koordinasi persiapan kegiatan dengan instansi terkait serta menjadwalkan kegiatannya secara rutin.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan untuk tujuan yang kedua yakni Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Meratadengan sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah sejak dimulainya periode Renstra tahun 2021 Belum pernah dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) oleh instansi terkait yakni Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu Kecamatan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mempersiapkan langkah-langkah perencanaan pembangunan desa agar indeks pembangunan desa bisa meningkat. Semoga ditahun 2026 mendatang dapat dilakukan evaluasi terhadap indikator penilaian IPD guna mengetahui kondisi terkini desa desa yang ada di Kecamatan Karangan. Sebagai solusinya Perlu dilakukan penilaian IPD secara mandiri atau mengajukan permohonan penilaian kepada instansi terkait seperti Bappeda Kabupaten Kutai Timur dan BPS untuk mengetahui Indek Pembangunan Manusia yang



ada di Kecamatan Karangasem.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan untuk tujuan yang ketiga Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik dengan sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik adalah sejak dimulainya periode Renstra tahun 2021 dan pernah dilakukan penilaian SAKIP oleh instansi terkait, perlu dilakukan penyusunan dokumen pendukung yang lebih sempurna.

pendukung secara berkala seperti PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, dan dokumen pendukung lainnya, serta mengajukan permohonan penilaian kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat dilakukan evaluasi SAKIP Kecamatan Karangasem

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi, maka Kecamatan Karangasem telah menyusun Renstra dengan merencanakan 6 program, 16 Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan adanya Rencana tersebut dapat mengoptimalkan kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran.



Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2024	Realisasi 2025	Target 2025
1	5	6	4	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	99,5%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	99,5%	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100	100
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	0	12
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecama	100	98,45	3
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100	0%	24



	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	0%	6
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	6
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	100	0	6
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	100	7
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	4
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	100	4
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100	0%	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	99,31%	1
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	7



	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100	96,53	6
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	99,73	2
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	1
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	1
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	1
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	100	98,44	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,52	1
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	98,52	8



	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	0	2
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	98,31	4
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	98,31	4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100	99,39	100
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan	100	99,39	11
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	99,83	7
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	98,92	1
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	98,92	7



	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	1
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	66,67	72,5	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	97,62	6
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	97,62	7
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	0	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	64,75	23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	64,12	23
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83,33	99,7	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	100	99,7	4
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	96,94	1



	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	96,2	1
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50	99,01	4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	99,23	1
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	100	69
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	98,34	4
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	0	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	100	98,84	3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	100	1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	1



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	1
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	99,66	1
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	99,74	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,78	60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	1
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	100	20
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	5
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	0	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	98,94	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	1



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	98,56	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	99,54	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	99,69	5
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	98,7	10



B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2024, realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.277.000	124.656.000	99,50%
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.277.000	125.277.000	99,50%
1.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.170.000	85.170.000	100,00
1.1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.107.000	39.486.000	98,45
	Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.370.000	198.836.000	99,73

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.051.000	69.946.00	98,44%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.181.000	45.496.000	98,52%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	325.000.000	324.062.000	99,71
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.870.000	24.450.000	98,31%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.870.000	24.450.000	98.31
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.528.000	50.217.600	99,39%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.528.000	50.217.600	99,39%
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.170.000	18.140.000	99,83
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.067.000	22.818.000	98,92
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.291.000	9.259.600	99,66
5.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.214.401.775	3.780.366.854	75,12%
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.427.000	51.180.000	97,62%
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.427.000	51.180.000	97,62
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.047.406.007	2.549.017.023	64,12%
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.451.007	2.549.017.023	64,12
6.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.880.000	56.850.000	99,95
6.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.075.000	15.030.000	99,70
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.856.000	47.363.400	96,94%
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	33.781.000	32.438.000	96,02
6.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan B arang Milik Daerah pada SKPD	15.075.000	14.925.400	99,01
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.878.500	116.974.300	99,23%
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63.362.500	63.362.500	100,00
6.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.516.000	53.611.800	98,34
6.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.992.271	506.164.800	99,84%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
6.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.119.000	80.119.000	100,00
6.5.2	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	39.987.000	39.987.000	100,00
6.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.292.600	36.292.600	100,00
6.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.210.671	32.102.000	99,66
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.100.000	61.937.000	99,74
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.283.000	255.727.200	99,78
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.604.229	98.604.229	100,00
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.677.229	84.677.229	100,0
6.6.2	Pengadaan Mebel	13.927.000	13.927.000	91,17
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.187.768	245.569.102	98,94%
6.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	66.000.000	100,0
6.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.187.768	179.569.102	98,56
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.050.000	93.614.000	99,54%
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.450.000	79.204.000	99,69
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.410.000	98,70

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi Anggaran Implementasi pengukuran efisiensi pada Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Sedangkan untuk menghitung efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja adalah realisasi Capaian Kinerja dibagi dengan Realisasi Capaian Anggaran sehingga dapat diperoleh perhitungan. Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien namun** Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka tingkat efisiensi pada Kantor Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur tidak efisien karena jumlah anggaran yang dianggarkan tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja nya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	1	20%	625.800.000,-	357.628.211,-	57,15%	0,35
	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat								
2	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	60	0	0%	776.081.149,-	470.262.051,-	61%	0,00
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa								
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Nilai SAKIP	0	0	0%	4.356.006.185,-	2.836.610.799,-	65,12%	0,00
	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik								



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
		Target 2025	Realisasi 2025	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	98,75%	0,98	125.277.000	124.656.000	99,50%	0,98
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30	2	0,9	125.277.000	124.656.000	99,50%	0,98
1.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	48	0,48	85.170.000	85.170.000	100,00	0,99
1.1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	0	0,00	40.107.000	39.486.000	98,45	0,90
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20	9	0,45	54.030.000	52.868.800	97,85%	0,98

No.	Program/Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Esisiensi
		Target 2025	Realisasi 2025	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	4	0,25	24.366.000	23.780.000	97,60%	0,99
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	2	0,33	24.366.000	23.780.000	97,60	0,99
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26	11	0,42	15.255.000	14.974.800	98,16%	0,97
2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	10	0,67	15.255.000	14.974.800	98,16	0,00
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18	0	0,00	14.409.000	14.114.000	97,95	0,00
2.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	4	0	0,00	14.409.000	14.114.000	97,95	1,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90%	100%	1,11	269.871.000	268.013.600	99,31%	0,99
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	3	1,00	269.871.000	268.013.600	99,31	0,99
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	5	1,67	32.320.000	32.320.000	100,00	0,98
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	1,00	38.181.000	36.857.600	96,53	0,99

3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	5	0,71	199.370.000	198.836.000	99,73	0,99
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	1,00	71.051.000	69.946.000	98,44%	0,99
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	1	0,09	46.181.000	45.496.000	98,52%	0,99
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	1	0,25	46.181.000	45.496.000	98,52	00,99
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	2	0,20	24.870.000	24.450.000	98,31%	0,98
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	2	0,20	24.870.000	24.450.000	98,31	0,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90%	63%	0,63	50.528.000	50.217.600	99,39%	0,97
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72	45	0,63	50.528.000	50.217.600	99,39%	0,95
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	2	0,29	18.170.000	18.140.000	99,83	0,00
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	7	1,00	23.067.000	22.808.000	98,92	0,02
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	7	1,00	9.291.000	9.259.600	99,66	1,00

5.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90%		0,81	5.214.401.775	3.780.366.854	72,12%	1,24
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8	0,40	52.427.000	51.180.000	97,62%	0,68
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	0,50	52.427.000	51.180.000	97,62	0,01
6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59	41	0,69	4.047.406.007	2.620.897.023	64,75%	0,53
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	10	0,83	3.975.451.007	2.549.017.023	64,12	0,49
6.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	15	0,63	56.880.000	56.850.000	99,95	0,01
6.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	4	2,00	15.075.000	15.030.000	99,70	0,03
6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22	37	1,68	117.878.500	116.974.300	99,23%	3,25
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28	20	0,71	63.362.500	63.362.500	100,00	0,01
6.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				54.516.000	53.611.800	98,34	
6.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59	44	0,75	506.992.271	506.164.800	99,84%	1,10

6.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1,00	80.119.000	80.119.000	100,00	0,04
6.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.987.000	39.987.000	100,00	
6.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7	2	0,29	36.292.600	36.292.600	100,00	0,00
6.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1,00	32.210.671	32.102.000	99,66	0,01
6.5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu				62.100.000	61.937.000	99,74	
6.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	40	0,80	256.283.000	255.727.200	99,78	0,01
6.5	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3	1	0,33	48.856.000	47.363.400	96,94%	2,76
6.5.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0,00	33.781.000	32.438.000	96,02	1,00
6.5.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0,00	15.075.000	14.925.400	99,01	1,00
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	15	1,00	98.604.229	98.604.229	100,00%	1,49
6.6.1	Pengadaan Mebel	1	1	1,00	13.927.000	13.927.000	100,00	
6.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	1,00	84.677.229	84.677.229	100,00	
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	0,33	248.187.768	245.569.102	98,94%	18,10
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	1,00	66.000.000	66.000.000	100,00	0,01
6.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	1,00	182.187.768	179.569.102	98,56	0,02
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1	0,33	94.050.000	93.614.000	99,54%	18,10

6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	1	0,50	79.450.000	79.204.000	99,69	0,13
6.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	1,00	14.600.000	14.410.000	98,70	

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka tingkat efisiensi pada Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur tidak efisien karena jumlah anggaran yang dianggarkan tidak berbanding lurus dengan capaian kinerjanya.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat dengan Sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan capaian kinerja sebesar 100% (sangat tinggi)
- Tujuan Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata dengan sasaran Meningkatnya Status

Kemajuan dan Kemandirian Desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Desa dengan capaian kinerja sebesar **99,31% (sangat tinggi)** tahun 2025

- Tujuan Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik dengan sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan capaian kinerja sebesar **75,12% (Sedang)** karena tidak adanya evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur sejak awal dimulai nya periode Renstra yakni tahun 2023.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Camat Karang Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, Kantor Camat Karang menerima anggaran sebesar **Rp 5.785.158.775,00 (lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Dari sejumlah anggaran tersebut diperuntukkan untuk belanja Pegawai sebesar



Rp 3.975.451.007; (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus lima Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah) atau sebanyak 90 % (Sembilan Puluh) Persen, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.711.103.539 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebanyak 57 % (lima puluh tujuh persen) serta untuk belanja modal sebesar Rp 98.604.229 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebanyak 5%

Realisasi belanja tahun 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 4.346.068.854,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 75,12% (Tujuh Puluh Lima Koma Dua Belas Persen)** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp **5.785.158.775,00 (lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Dibandingkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.770.753.593,00 (Lima Miliar tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi 71,95% maka Realisasi anggaran Kantor Camat Karangan mengalami penurunan sebesar 11,11% (Sebelas koma Sebelas Persen) meskipun terjadi kenaikan anggaran yang diterima Kantor Camat Karangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders*

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Karangan, 15 Januari 2026

Camat,



MADNUH, SP.,M.A.P

Pembina/IVa

NIP. 19681023 200604 1 010



LAMPIRAN LAMPIRAN

